

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Desa yang notabeneanya merupakan daerah masyarakat tradisional, dimana masih banyak menganut pola perilaku yang didasarkan pada adat istiadat yang lama. Tradisi adat istiadat dan pemaknaan nilai-nilai budaya dari masyarakat yang lebih mengarah pada patriarki (penekanan pada peran laki-laki), sehingga mengakibatkan kaum perempuan kurang dilibatkan dalam pembangunan. Kaum perempuan dianggap hanya layak berada pada ranah domestik bukan ranah sosial, permasalahan kemasyarakatan isu-isu sosial hanya dilibatkan pada kaum laki-laki. Selain itu, di tingkat desa, masyarakat dipengaruhi oleh faktor kebijakan pemerintah dalam hal keterlibatan perempuan dalam pembangunan yang hanya menyediakan sedikit kuota, pemerintah yang hanya memberikan sedikit presentase bagi keterlibatan perempuan dalam pembangunan. Dari 100%, perempuan hanya diberikan porsi 30 persen.

Dalam terselenggaranya pembangunan di wilayah desa tidaklah lepas dari peran penting partisipasi atau keterlibatan masyarakat yang didasarkan atas keyakinan dan kesadaran yang datang dari dalam dirinya sendiri, sehingga memungkinkan masyarakat memiliki rasa tanggung jawab terhadap daerahnya sendiri. Agar upaya pembangunan desa dapat terpenuhi sesuai dengan apa yang dicita-citakan maka diperlukan suatu perencanaan pembangunan yang

bersumber pada prinsip dasar pembangunan daerah yaitu dari, oleh, dan untuk masyarakat itu sendiri. Oleh karena hal tersebut diperlukan kemampuan masyarakat untuk mengenali dan memecahkan segala permasalahan yang ada didalam wilayah tersebut serta dapat menggali potensi-potensi yang ada untuk selanjutnya dimanfaatkan dalam kegiatan pembangunan (syahrul, 2014).

Pasal 27, Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan secara tegas bahwa, setiap warga negara Indonesia, mempunyai hak dan kewajiban serta kesempatan yang sama untuk memperoleh penghidupan yang layak. Dalam konteks pembahasan ini bisa diartikan bahwa, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan untuk ikut serta dalam mensukseskan program-program pembangunan. Namun kenyataannya, posisi dan peran perempuan dalam pembangunan masih termarginalkan. Implikasinya, walaupun dari segi kuantitas jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki, akan tetapi secara kualitas lebih kecil dari laki-laki.

Maka dengan adanya Program kesetaraan dan keadilan gender ini tercantum dalam Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarus Utamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional, sebagai salah satu strategi untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dengan menjadikan gender sebagai arus utama dalam pembangunan, dan ditegaskan lagi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2005-2009. Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) diinstruksikan kepada seluruh Departemen maupun Lembaga Pemerintah dan non Departemen di

Pemerintah Nasional, Provinsi maupun di Kabupaten/kota, untuk melakukan penyusunan program dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dengan mempertimbangkan permasalahan kebutuhan, aspirasi perempuan pada pembangunan dalam kebijakan, program/proyek dan kegiatan (Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000, 2009).

Berdasarkan pengamatan awal menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Sumedang adalah 569.024 orang, sedangkan jumlah penduduk perempuan adalah 573.073. Di Kecamatan Jatigede, jumlah penduduk laki-laki adalah 11.594 orang, sedangkan jumlah penduduk perempuan adalah 12.439 orang. Jumlah perbandingan antara laki-laki dan perempuan di Kabupaten Sumedang tidak seimbang, bahkan di Kecamatan Jatigede penduduk perempuan lebih banyak daripada penduduk laki-laki. Realita yang terjadi jumlah tersebut ternyata sebanding dengan jumlah partisipasi perempuan didalam hal pembangunan, terutama di pedesaan (BPS Kab. Sumedang, 2016).

Data di desa Jemah tahun 2019 menunjukkan jumlah laki-laki adalah 737 orang dan jumlah perempuan adalah 794 orang. Dari data tersebut terlihat jumlah perempuan lebih banyak dari pada jumlah laki-laki.

Dalam konteks lokal, khususnya di daerah Sumedang, partisipasi perempuan ini mulai ikut dilibatkan dalam pembangunan mulai dari tingkat Kabupaten, sampai ke tingkat desa. Desa Jemah sendiri terdiri dari beberapa Dusun yaitu Dusun Bakom, Sabeulit, Brujul dan Jati Mekar.

Hal tersebut diperkuat oleh masyarakat desa Jemah yang mengatakan bahwa partisipasi perempuan dalam pelaksanaan pembangunan di desa Jemah cukup baik dan aktif, bisa dikatakan dari 100% masyarakat yang aktif ikut program pemerintahan didesa 60%, 20% ikut serta menjadi kader/anggota aktif dan 20% Balita, lansia, jompo, remaja yang bersekolah diluar desa yang memang kurang aktif dalam mengikuti program desa tersebut. dilihat dari partisipasi perempuan dalam hal ikut musyawarah perencanaan pembangunan desa atau dalam istilah desa Jemah disebut dengan Rembug warga, Rembug warga disini sebagai wadah sillaturahmi antar masyarakat dengan pemerintah desa, dan antara masyarakat dengan stakeholder pembangunan lainnya untuk mendapatkan keserasian antara kebijakan pembangunan yang ada serta menjaring aspirasi semua pemangku kepentingan. Selain itu banyak program Pemerintahan yang perempuan desa Jemah selenggarakan dan ikut berpartisipasi juga, baik dalam bidang ekonomi, kesehatan, maupun sosial. Seperti program UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) merupakan suatu kegiatan ekonomi produktif yang berusaha meningkatkan pendapatan yang dilakukan oleh keluarga sejahtera secara berkelompok di lingkungan masyarakat desa. Salah satu kegiatan dalam peningkatan upaya peningkatan kesejahteraan keluarga diwilayah Desa Jemah yaitu usaha pembuatan Kerupuk Bongkok Pisang, yang diproduksi oleh kader UPPKS dan sudah ada label halalnya. KWT (Kelompok Wanita Tani) merupakan salah satu organisasi masyarakat di Desa Jemah, kabupaten Sumedang yang

berfungsi sebagai wahana penyuluhan dan penggerak berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan perekonomian ibu-ibu rumah tangga dengan cara mendorong perempuan mencapai kemandirian ekonomi. Program pengolahan produk pertanian berupa kecimpring, keripik dan opak. Di Dusun Bakom sendiri terdapat Kelompok Perikanan yang mengolah produksi ikan bendungan yang dibuat dendeng dan pepes maupun dijual mentahan. Dari segi kesehatan terdapat program Posyandu, Badan Keluarga Balita (BKB) , dan (RDS) Rumah Desa Sehat seperti pemeriksaan kesehatan, tensi darah, sosialisasi, penyuluhan dan senam lansia maupun semua kalangan. Dalam segi sosial, di desa Jemah diadakan program majelis ta'lim sedesa dan program momentum (hari-hari besar dan perlombaan), untuk meningkatkan interaksi dan silaturahmi masyarakat desa. Namun dalam hal ini, tidak terlepas dari faktor yang mendorong perempuan berpartisipasi dan hambatan yang dialami perempuan desa Jemah dalam berpartisipasi. Ada beberapa faktor, diantaranya : adanya kesempatan berpartisipasi, dukungan keluarga, kesadaran mengembangkan potensi masyarakat, sehingga itu masih sulit penjualan atau pemasaran produk desa, maupun beban ganda yang dimiliki perempuan, dll.

Pada kenyataannya perempuan saling bersinergi dalam hal partisipasi perencanaan pembangunan. Perubahan pola pikir masyarakat desa yang sudah lebih berkembang dan maju tidak lagi membedakan jenis kelamin tertentu yang menjadi cakupan dalam proses pembangunan.

Dari perubahan tersebut, skripsi ini penulis tertarik melakukan penelitian "**Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan Desa ( Studi Kasus Di Desa Jemah Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang )**".

### **1.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas peneliti mengidentifikasi beberapa masalah, antara lain:

1. Partisipasi perempuan dalam kegiatan pembangunan di Desa Jemah.
2. Adanya bentuk kontribusi perempuan dalam pembangunan di Desa Jemah.
3. Adanya beberapa faktor yang menjadi pendorong dan hambatan berpartisipasi dalam pembangunan di desa Jemah.

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apa yang melatarbelakangi perempuan di Desa Jemah Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang berpartisipasi dalam pembangunan desa ?
2. Bagaimana bentuk-bentuk partisipasi perempuan dalam Pembangunan di Desa Jemah Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang ?
3. faktor apa saja yang menjadi pendorong dan penghambatan perempuan berpartisipasi dalam pembangunan di Desa Jemah Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengidentifikasi dan menjelaskan Partisipasi perempuan dalam kegiatan pembangunan di Desa Jemah Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang.
2. Untuk Mengetahui bentuk-bentuk partisipasi perempuan dalam pembangunan di Desa Jemah Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang.
3. Untuk Mengetahui faktor apa saja yang menjadi pendorong dan penghambatan perempuan berpartisipasi dalam pembangunan di Desa Jemah Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang.

### 1.4 Kegunaan Penelitian

Akademis (teoritis) dan praktis. sebagai berikut:

#### 1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi penelitian dalam bidang ilmu sosial atau sosiologi, terlebih dapat memberikan sumbangsih pengetahuan dan pengembangan masyarakat sosial yang berkaitan dengan partisipasi perempuan dalam pembangunan desa.

#### 2. Kegunaan praktis

##### a. Untuk Peneliti

Dapat memberikan pemahaman bagi peneliti mengenai partisipasi perempuan dalam Pembangunan Desa.

##### b. Untuk Peneliti Selanjutnya

Dapat menjadi rujukan, sumber informasi dan bahan referensi penelitian selanjutnya agar bisa lebih memahami mengenai pembangunan desa.

c. Untuk Lembaga

Dapat memberikan masukan dan evaluasi yang berguna, untuk lembaga yang ada di desa Jemah yang berkaitan dengan pembangunan desa.

d. Untuk Umum

Dapat meningkatkan kesadaran perempuan dalam pembangunan dan meningkatkan partisipasi masyarakat pembangunan suatu desa.

## 1.5 Kerangka Pemikiran

Dalam dekade ini, pembangunan bangsa sudah diarahkan pada pengembangan kebijakan, program, dan proyek yang secara khusus dirancang untuk mengangkat kesetaraan gender terutama kaum perempuan (Elly M Setiadi, 2011: 902).

Perempuan, baik sebagai warga negara maupun sebagai manusia bagi pembangunan mempunyai hak, kewajiban, dan kesempatan yang sama dengan laki-laki di segala bidang kehidupan bangsa dan dalam segenap kegiatan pembangunan. Sehubungan dengan itu, kedudukannya dalam masyarakat dan peranannya dalam pembangunan perlu terus ditingkatkan serta diarahkan sehingga dapat meningkatkan pertisipasinya dan memberikan sumbangan yang sebesar-besarnya bagi pembangunan bangsa sesuai dengan kodrat, harkat, dan martabatnya.



Posisi perempuan dalam pembangunan memang seharusnya ditempatkan sebagai partisipan atau subjek pembangunan bukan sebagai objek sebagaimana yang terjadi selama ini. Realitas menunjukkan bahwa posisi perempuan masih sebagai objek pembangunan, karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: pertama, masih kuatnya faktor sosial dan budaya patriarki yang menempatkan laki-laki dan perempuan pada posisi yang berbeda. kedua, masih banyak perundang-undangan, kebijakan dan program pembangunan yang belum peka gender. ketiga, kurang adanya sosialisasi ketentuan hukum yang menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan secara menyeluruh. keempat, belum adanya kesadaran gender di kalangan para perencana dan pengambil keputusan. kelima, belum lengkapnya data pilah yang memaparkan posisi perempuan dan laki-laki secara jelas dalam bidang pembangunan di semua departemen. keenam, belum maksimalnya kesadaran, kemauan dan konsistensi perempuan itu sendiri. Dan ketujuh, kurangnya pengetahuan perempuan terhadap tujuan dan arah pembangunan sehingga perempuan kurang respon, masa bodoh atau menolak secara tidak langsung dari program-program pembangunan.

Paradigma pembangunan Indonesia mulai bergeser dari pembangunan yang top down kepada pembangunan dari bawah (bottom up). Pembangunan tidak hanya bersifat linier dan tidak hanya melibatkan aparatur pemerintahan saja. Paradigma pembangunan menjadi “Pembangunan Partisipatif”. Hal ini dilandasi oleh UU No. 22/1999, tentang Pemerintah Daerah, dan UU No.

25/1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Dalam pembangunan yang menggunakan pendekatan bottom up (partisipatif) tersebut masyarakat menjadi ujung tombak dari sebuah pembangunan. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan dapat secara aktif berperan serta dalam menentukan arah pembangunan.

Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan partisipatif diindikasikan oleh adanya kemampuan masyarakat dalam pengorganisasian kegiatan bersama untuk memecahkan permasalahan bersama. Pengorganisasian masyarakat diartikan sebagai pengorganisasian kesadaran, potensi, rencana, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi dari kegiatan masyarakat dalam rangka pemecahan masalah tersebut. Dengan demikian, perempuan sebagai bagian dari anggota masyarakat yang merupakan ujung tombak dari proses pembangunan partisipatif tersebut juga menjadi sangat penting keberadaannya.

Dalam mekanisme partisipasi perempuan dalam pembangunan desa yaitu Program Pemerintah Desa (UPPKS, Rembug warga, KWT dan Perikanan, Posyandu, RDS, BKB, dan Pengajian Sedesa) penulis menggunakan Teori Feminisme dari Betty Friedan pelopor dari Gerakan Feminis Abad-20. Betty Friedan berpendapat Gerakan feminisme adalah gerakan pembebasan perempuan dari rasisme, *stereotip*, seksisme, penindasan perempuan dan phalagosentrisme. Salah satu contoh dari gerakan pembebasan perempuan ini

adalah Organisasi Nasional Perempuan (*National Organization for Women/ NOW*) yang didirikan oleh Betty Friedan. Friedan menyatakan bahwa adanya suatu gerakan hak-hak sipil bagi perempuan adalah sebuah keperluan yang mutlak. Perempuan memiliki hak untuk ikut serta menentukan pilihannya dalam dunia publik sebagaimana yang dimiliki oleh laki-laki. Tidak ada batasan antara perempuan dan laki-laki, baik di dunia privat maupun publik, karena mereka merupakan manusia memiliki kemampuan rasional dalam setiap tindakan yang mereka lakukan. Agger (1998) menyatakan bahwa prestasi besar dari teori feminis adalah bahwa bukan hanya tentang pemahaman, namun juga tentang tindakan.

Dalam partisipasi perempuan dalam pembangunan desa melalui mekanisme Program Pemerintahan desa seperti : UPPKS, Rembug warga, KWT dan Perikanan, Posyandu, RDS, BKB, dan Pengajian Sedesa dapat diketahui seberapa besar partisipasi langsung dari perempuan dalam proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi serta upaya melibatkan perempuan, bentuk dari partisipasi perempuan dalam pembangunan desa dan faktor yang menjadi hambatan dalam berpartisipasi. Pentingnya partisipasi perempuan tidak lagi dapat diabaikan karena keterlibatan perempuan menjadi syarat mutlak dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkeadilan. Untuk lebih jelasnya dapat dicermati dalam bagan kerangka berpikir.

Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka pemikiran penelitian ini dapat dipahami lewat bagan berikut:

**Gambar 1: Kerangka Pemikiran**

